

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

(Studi Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Hukum Tatanegara

Oleh

**Elisa Septiyona
NPM : 1521020272**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

(Studi Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Hukum Tatanegara

Oleh

**Elisa Septiyona
NPM : 1521020272**

Program Studi : Hukum Tatanegara

Pembimbing I :Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II :Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada Pekon Bangun Negara belum terdapat laporan secara konkret dan publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ditegaskan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 5 menyebutkan Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Apa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang implementasi prioritas penggunaan dana desa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa serta pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang implementasi prioritas penggunaan Dana Desa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun populasi adalah seluruh masyarakat Pekon Bangun Negara, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, setelah data terkumpul maka penulis menganalisis data secara kualitatif dan menggunakan pendekatan berpikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara pada tahun 2018 diprioritaskan pada bidang pembangunan fisik. Implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara di tinjau dari hukum positif telah terimplementasi sesuai Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 1 dan 2. Namun transparansi informasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara tidak dipublikasikan oleh pemerintah Pekon Bangun Negara di ruang publik sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 5. sedangkan ditinjau dari hukum Islam pada bidang pembangunan telah sesuai dengan hukum Islam dan bidang pemberdayaan masyarakat juga telah sesuai Islam namun belum maksimal karena jumlah penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat masih sedikit atau sebesar 22,8% dari Dana Desa dan sebesar 21,41% dari dana APB/Pek yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku di kabupaten Pesisir Barat.

Kata kunci : Peraturan Menteri Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Hukum Islam dan Hukum Positif.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Septiyona
NPM : 1521020075
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung,

Penulis,

Elisa Septiyona
15210202





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suralamin Sukarame Bandar Lampung Telp. (071) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: Analisis Hukum Islam dan Hukum
Positif Tentang Implementasi
Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Studi Pekon Bangun Negara
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat)**

Nama Mahasiswa

: Elisa Septiyona

NPM

: 1521020272

Jurusan

: Siyasah Syar'iyah

Fakultas

: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 196210219930310002

NIP. 197807252009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. H. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikot H. Endang Sarudin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 705200

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**, disusun oleh: **Elisa Septiyona, NPM: 1521020272**, program studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 24 Oktober 2019.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji Utama: Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP.196210219930310002**

MOTTO

نَزَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَلَا مَرُوا إِلَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

خَيْرُ ذَلِكَ أَلَا خَرُوا لِيَوْمٍ بِاللَّهِ تَوَمُّونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٌ فِي ت

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(An-Nisa (4) : 59)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Alm. Ayahanda tercinta, Apen, berkat doa ayah yang tak pernah putus saat ayah didunia maupun ayah sudah disurga-Nya,dan terimakasih sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan putrimu.
2. Ibu tersayang, Parice Sahana, yang terus melantunkan doa yang mengalir tulus dalam setiap sujudnya, terimakasih untuk cinta, kasih sayang, dukungan serta nasehat dan doa yang tiada henti. Karya sederhana ini penulis persembahkan tidak sejujung kukupun dapat membalas perjuangan kalian tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit membuat rasa bangga dan melukiskan senyum bahagia diwajah Ayah dan Ibu.
3. Dan adik-adikku tersayang, Dandi Muhammad Farhan, Tantio Dafri, Azriel Mustofa terimakasih atas canda tawa, dukungannya dan doa yang selama ini kalian berikan, semoga kita semua bisa membuat orang tua kita bangga dan senantiasa tersenyum bahagia.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Elisa Septiyona, lahir pada tanggal 27 September 1997 di Desa Sumur Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Almarhum Bapak Apen dan Ibu Parice Sahana.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SD N 1 Siging pada tahun 2003. Selama duduk dibangku SD penulis menjadi anggota seni tari.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama SMP N 1 Pesisir Selatan pada tahun 2009. Selama duduk dibangku SMP penulis menjadi anggota osis, pramuka dan seni tari.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA N 1 Pesisir Selatan pada tahun 2012.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, betapa banyak nikmat yang Allah SWT berikan. Berkat kemurahan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan dan pengorbanan dan keberaniannya sehingga membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Skripsi ini tidak akan selesai tanpa waktu dan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. beserta jajarannya.
2. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dipimpin oleh Dekan Dr. H. Khairuddin, M.H. beserta jajarannya.
3. Prodi Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang di kepala oleh Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. beserta jajarannya.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Dr. H. Khairuddin, M.H. dan Khoiruddin, M.S.I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya.

5. Tim Penguji Munaqasyah yang di ketuai oleh Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. beserta tim penguji lainnya yang telah memberikan kesempatan untuk menguji skripsi.
6. Peratin Pekon Bangun Negara, Ohpir Patirin beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dan izin menjadi objek dalam penelitian.
7. Dosen Fakultas Syariah, Staf perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Teman-teman yang menjadi saudaraku, jurusan Siyasah kelas E angkatan 2015 yang sama-sama berjuang meraih gelar Sarjana Hukum.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan (Riza Andesta, Afriza Yanti, Ika Apriana, Repi Susanti, Yunnita, Zakiatunnisak, Fitria, Mutiara Havi, dan Resa Verna) yang selalu ada untuk mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulismendapat ridha dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT.*Amin Yaa Robbal 'Alamin*. Dan skripsi ini dapat menjadi refrensi untuk penelitian yang akan datang serta bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, September 2019

Elisa Septiyona

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	18
1. Kebijakan Dana Desa.....	18
2. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	29
3. Kebijakan Penggunaan Dana Dalam Islam.....	39
B. Tinjauan Pustaka.....	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	66
1. Sejarah Pekon Bangun Negara.....	66
2. Kondisi Geografis dan Demografis Pekon Bangun Negara.....	67

3. Organisasi Pemerintahan Pekon Bangun Negara.....	69
B. Deskripsi Data Penelitian.....	70
1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon Bangun Negara Periode 2018.....	70
2. Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Pekon Bangun Negara Periode 2018.....	74

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian.....	84
B. Pembahasan.....	90
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018.....	90
2. Pandangan hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Rekomendasi.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (APBPek) Pekon BangunNegara 2018.....	71
2. LaporanRealisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (APBPek)Pekon Bangun Negara 2018.....	75

DAFTAR GAMBAR

1. Pembangunan Drainase.....	77
2. Pembangunan Rabat Beton.....	78
3. Pembangunan Pembukaan Jalan.....	78
4. Pembangunan MCK 2 Unit.....	78
5. Sumur Galian.....	78
6. Pembangunan Gorong-gorong dan TPT.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Kartu konsultasi skripsi
2. Lampiran 2 : Surat permohonan izin riset
3. Lampiran 3 : Surat balasan permohonan izin riset
4. Lampiran 4 : Surat keterangan wawancara
5. Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara
7. Lampiran 7 : APBPekon Bangun Negara tahun anggaran 2018
8. Lampiran 8 : Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pekon Bangun
Negara Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**” untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Analisis** adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya atau penyidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Dapat pula diartikan dengan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.²
2. **Hukum Islam** adalah hukum Islam terdiri dari rangkaian kata “Hukum” dan “Islam” memang tak ada penyebutan kata hukum dan Islam didalam Alquran meskipun kata hukum, baik dalam bentuk ma’rifah (Definite) disebutkan tidak kurang dari 25 kali di ayat Al-Quran. Dalam literatur klasik tentang hukum Islam sendiri tidak ditemukan lafazh “hukum Islam”. Yang bisa digunakan adalah syari’at

¹ Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Jakarta : Gitamedia Press, 2017) h.50.

² Ebta Stiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2016)

atau hukum syar'i.³ Hukum peraturan-peraturan dan ketentuan berdasarkan syariat Islam⁴

3. **Hukum Positif** disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁶

4. **Implementasi** adalah pelaksanaan; penerapan:

5. **Prioritas** yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain

6. **Penggunaan** proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.⁷

7. **Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

³Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, (Tangerang : Gaya Media Pratama, 2009), h. 20.

⁴Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru...*, h.332.

⁵ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* .(Bandung: Alumni, 2008), h. 56.

⁶ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2016, pukul 23.30 WIB.

⁷ <https://kbbi.web.id> , diakses pada tanggal 24 Februari 2016, pukul 23.30 WIB.

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.⁸

8. **Bangun Negara**, sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.⁹

Dari penjelasan beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian hukum Islam dan hukum positif tentang implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa No 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada BAB III Pasal 4 ayat 1 menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Akan tetapi bila di tinjau dari penggunaan dana pemerintahan di zaman Rasulullah hingga dinasti-dinasti besar dana tidak hanya di gunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan namun juga digunakan di luar pembangunan dan pemberdayaan ummat. Implementasi prioritas penggunaan dana desa

⁸A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buku 2 Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2016), h. 10.

⁹bangunnegara.wordpress.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2019, pukul 23.30 WIB.

yang di berlakukan sejak tahun 2015 hingga sekarang masih belum sampai 100% di implementasikan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena terdapat ada perbedaan prioritas penggunaan. Pada sisi lain Pekon Bangun Negara salah satu desa yang rutin menerima Dana Desa namun hingga kini perkembangan belum ada laporan konkrit yang di peroleh mengenai implementasi prioritas penggunaan Dana Desa.

2. Alasan subjektif

- a. Penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di jurusan siyasah fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya berbagai literature yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Basis kemajuan sebuah Negara di tentukan oleh kemajuan Desa. Kemajuan Desa tidak dapat di wujudkan tanpa adanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan penggunaan keuangan desa yang baik. Keuangan desa di definisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan kewajiban dan hak tersebut.¹⁰

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan-peraturan tentang desa baik dalam melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah dan peraturan lain yang terkait. Di dalam UU Desa dikatakan bahwa setiap Desa akan mendapat dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10% setiap tahunnya yang di sebut dengan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.¹¹ Maka dapat di perkirakan setiap desa mendapatkan dana paling sedikit sekitar 800 juta dan bisa melebihi dari 1 milyar setiap tahunnya. Sedangkan penyaluran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 telah mencapai sebesar Rp. 122,09 Triliun.¹²

¹⁰Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : Fokusmedia, 2014), h. 3.

¹¹A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,... h. 10.

¹²<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2016, pukul 23.40 WIB.

Prioritas penggunaan dana desa telah di atur dalam Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada BAB III Pasal 4 ayat 1 menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bersifat lintas bidang. Pada ayat 3 yang dimaksud dalam ayat 2 meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan pedesaan, BUM Desa, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa. Pada ayat 5 juga menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat di akses masyarakat Desa.¹³

Dizaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (sejenis pajak tanah), zakat, *khums* (pajak 1/5), *jizyah* (sejenis pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya *kaffarah*/denda). Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.¹⁴ Sedangkan pada Zaman Umar Bin Khattab di sisi pengeluaran, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian besar. Umar ibnul khatthab memerintahkan Amr ibn Abdil Amr ibn Ash, gubernur mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk hal

¹³ PERMENDES No 19 Tahun 2017

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam* (Jakarta :Gema Insani Press, 2001), h. 25.

ini. Dia melakukan penggalian kanal dari fustat (kairo) ke Suez untuk memudahkan transportasi dagang antara semenanjung Arab dan Mesir. Juga pembangunan dua kota bisnis: Kufah (untuk bisnis dengan romawi) dan Basrah (bisnis dengan persia).¹⁵

Dari pengertian di atas prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Sedangkan pada zaman Rasulullah pengeluaran di implementasikan berbagai kepentingan dengan proporsi yang adil. Oleh karena itu Prioritas Pengeluaran di implementasikan dengan keadilan dan terpenuhi secara *kaffah* akan tetapi dalam Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan Pekon Bangun Negara adalah salah satu pekon yang ada di kecamatan Pesisir Selatan dengan menerima Dana Desa secara rutin, hingga kini Pekon tersebut telah melakukan perubahan kemajuan desa sedikit demi sedikit namun tidak memungkinkan kenyataan prioritas penggunaan Dana Desa pekon Bangun Negara terimplementasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang desa atau dalam pandangan hukum Islam sebab hingga kini tidak semua desa memberikan bukti laporan konkrit secara normatif dan empiris yang di publikasikan kepada masyarakat melalui website atau media informasi tertentu. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal

¹⁵*Ibid.*, h. 26.

68 mengungkapkan tentang Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 5 prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa artinya masyarakat secara langsung ikut mengawasi dan membantu pembangunan desa serta berhak mengetahui prioritas penggunaan Dana Desa.

Dari penjelasan diatas bahwa didalam Islampengeluaran pemerintahan tidak hanya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaanakan tetapi pengeluaran pemerintah diimplementasikan pada berbagai kepentingan secara proporsi tertentu.Sedangkan didalam hukum positif implementasi penggunaan Dana desa di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan. Akan tetapi penulis berfikir mungkin dikarnakan pada masa Rosululloh saw, fasilitas infrastruktur belum mendapat perhatian dan perkembangan dan masyarakatnya masih belum mengalami perkembangan yang besar jumlah penduduknya. Sedangkan pada masa modern ini sudah banyak masyarakat yang berkembang pesat jumlah penduduk dan keterbatasan infrastruktur di wilayah-wilayah tertentu. Selain itu pada Pekon Bangun Negara menjadi objek penelitian yang membuat penulis tertarik sebab Pekon Bangun Negara adalah salah satu dari beberapa Pekon yang ada di kecamatan Pesisir Selatan yang mengalami

perkembangan namun belum nampak bukti laporan konkret secara normatif dan empiris yang di publikasikan pada masyarakat.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penelitian, sehingga penelitian ini di fokuskan pada masalah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun fokus masalah dalam penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pasisir Barat. Masalah penelitian yang hanya fokus pada implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara tahun 2018 dengan landasan hukum UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Apa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang implementasi prioritas penggunaan dana desa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan Implementasi prioritas penggunaan Dana Desa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang implementasi prioritas penggunaan dana desa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka signifikansi atau manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Signifikansi secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara penelitian skripsi ini.
 - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya implementasi prioritas penggunaan Dana Desa.
2. Signifikansi secara praktis yaitu:
 - a. Untuk memperluas pengetahuan penulis.
 - b. Sebagai masukan pemerintah Pekon Bangun Negara untuk mempertimbangkan kebijakan.

- c. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa/i sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana atau Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka dan lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dimana yuridis normatif dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data sekunder.¹⁶ Dan yuridis empiris penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskrikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹⁶ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 25.

diteliti. Serta mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini tergolong penelitian normatif dan empiris, maka data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷ Adapun data primer yang digunakan adalah melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden penelitian di lapangan.¹⁸ Wawancara dilakukan pada Kepala Desa dan Aparatur desa yang terkait di Pekon Bangun Negara.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Data ini diperoleh dari kajian pustaka seperti hasil penelitian, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁹ Adapun data bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 30.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

¹⁹ *Ibid.*, h. 87.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa :

- a) Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik yang diperoleh dari media cetak dan elektronik, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan insiklopedi yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Dalam hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 5.196 terdiri dari Pejabat Pekon Bangun Negara, Lembaga Himpun Pemekonan (LHP),

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan keseluruhan masyarakat Pekon Bangun Negara.

Sampel adalah bagian dari suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.²¹ Penelitian kali ini menggunakan tehnik sampel *nonprobability sampling* yakni jenis *purposive Sampling*. *Purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penentuan menggunakan *Purposive Sampling*, maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu :

- 1) Pejabat pemerintah Pekon Bangun Negara
- 2) Kepala dusun yang terlibat dalam musyawarah rencana pembangunanPeko Bangun Negara
- 3) Ketersedian waktu responden untuk di wawancara

Berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan maka dapat diambil jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari Peratin Pekon, Sekretaris Pekon, Bendahara Pekon, Ketua LHP, dan 7 Kepala Dusun.

²¹Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 33.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara observasi, interview, dan dokumentasi yaitu sebagai berikut :

1) Metode observasi

Metode Observasi merupakan suatu cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat/mengamati secara langsung.²²

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi partisipatif, dimana peneliti ikut terlibat kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti mengumpulkan data-data yang dicari, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna dan setiap perilaku yang tampak.²³ Observasi ini dilakukan untuk mengamati prioritas penggunaan dana desa yang ada di wilayah Desa Bangun Negara dengan implementasi Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam.

²³*Ibid*, h. 310.

2) Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴ Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur yaitu wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, wawancara ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Desa atau Peratin, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Bangun Negara.

3) Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperkuat hasil penelitian dan hasil wawancara dan observasi. Dokumen ini berupa data-data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 tentang

²⁴*Ibid.*, h. 311.

penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam.

b. Pengolahan Data

Dalam melaksanakan pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevasinya sebagai peneliti.
- 2) Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut jenisnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisa data.
- 3) Sistematika data yaitu menyusun data sesuai dengan bidang telaah atau pokok bahasan dengan makna untuk memudahkan dalam menganalisa data.

5. Analisa Data

Data yang telah diperoleh, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Dana Desa

a. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Pemerintahan Desa dapat dikatakan merupakan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang menanggulangi pembangunan di Desa, dan sebaliknya pemerintahan desa itu sendiri adalah salah satu bagian dari isi gerak pembangunan desa. Pembangunan Desa ialah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan dalam desa.²⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan

²⁵ HAW. Widjaja, *Otonomi DESA* (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h. 3.

²⁶ Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah* (Bandung : Alumni IKAPI, 1983), h. 312.

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Dilihat dari cirri geografis, demografis, dan sosilogisnya, desa mempunyai cirri perdesaan yaitu wilayah yang jauh dari pusat ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten/kota. Penduduk desa umumnya berasal dari satu keturunan (geneologi) sehingga mempunyai sistem kekerabatan yang erat. Mata pencaharian penduduknya umumnya di bidang pertanian dan perikanan.²⁸

Setelah mengalami kevakuman selama 10 tahun, melalui undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa mulai mendapat dasar aturan yang jelas lagi. Undang-undang ini mengatur pemerintahan desa sebagai berikut;

- 1) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan Lembaga Musyawarah desa;

²⁷ UU No. 6 Tahun 2014

²⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 3.

- 3) Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas unsur staf dan unsur pelaksana: sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana;
- 4) Sekretaris desa memimpin sekretariat desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan;
- 5) Desa bukanlah daerah otonom sebagaimana daerah otonom dalam pengertian Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II;
- 6) Desa bukanlah suatu satuan wilayah. Desa hanya bagian dari wilayah kecamatan;
- 7) Desa adalah suatu ketatanegaraan yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ini secara konstitusional mengacu pada undang-undang Dasar 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar pasal 18 UUD 1945 ini dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah. Kemudian berdasarkan pasal 88 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I seluruh Indonesia. Isinya supaya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan berpedoman pada instuksi Mendagri ini.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan Perangkat Desa. Dalam Peraturan Mendagri ini struktur organisasi pemerintahan desa digambarkan dalam bagan sebagai berikut:²⁹

Undang-Undang Nomor 32/2004 menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk **mengatur** dan **mengurus** kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Perhatikan kata mengatur dan mengurus yang dicetak tebal di atas. Mengatur artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (*policy regulation*), sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*).³⁰

b. Keuangan Desa

Setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa perubahan yang signifikan dalam peraturan tentang Desa. dari sisi regulasi, Desa tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. UU Desa yang baru tersebut telah memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang

²⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*, h. 61-62

³⁰ *Ibid.*, h. 64

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Hingga saat ini Desa merupakan satu-satunya benteng kelembagaan lokal yang hingga saat ini, secara politik masih diakui dalam sebuah lingkup kebijakan negara sebagai sebuah daerah yang diakui karena sifat keaslian yang melekat didalam entitas tersebut. Pada berbagai negara didunia, sebagai komitmen dalam mempertahankan identitas lokalitas yang merupakan nilai budaya lokal pada setiap bangsa. tentunya ini dapat dikemukakan bahwa desa merupakan jembatan nasionalisme yang terakhir.

Dalam pemerintahan Desa tentu mengelola keuangan merupakan bagian dari wewenang desa demi mencapai tujuan desa. Keuangan Desa dapat di artikan pengelolaan keuangan desa yang memiliki sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran keuangan. Pendapatan Desa dapat bersumber dari (1) Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi dan lain-lain pendapatan asli yang sah; (2) Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah; (3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; (4) Sumbangan dari pihak ketiga dan; (5) Pinjaman Desa.³¹ Sedangkan dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 pendapatan Desa meliputi semua

³¹ HAW. Widjaja, *Otonomi DESA...*, h. 131.

penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Dalam pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa, yang bersumber dari hasil usaha yang termasuk BUM Desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, dan lainnya.
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota paling sedikit memperoleh 10% dari pajak dan retribusi.
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 5) Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- 7) Lain-lain pendapatan yang sah.³²

Demikian sumber pendapatan keuangan Desa dimana sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Desa belum memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan setelah berlakunya UU tersebut maka Desa memperoleh Dana Desa

³² A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*, h. 207.

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan Desa yang berlaku. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Bupati. Tata cara pungutan obyek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.³³

c. Dana Desa

Dana Desa adalah sumber pendapatan desa dari APBN diperoleh secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN ini mengalir ke kas desa terbagi ke dalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk di salurkan ke kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap memiliki dua arti:

1) Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa.

Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan desa

³³HAW. Widjaja, *Otonomi DESA...*, h. 132.

nasional di satu sisi dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam PP 22/1015 ,yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017.

- 2) Merujuk pada ‘tata cara penyaluran’ yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan april 40% 2) bulan juli 40% dan 3) bulan oktober 20% dari total Dana desa.

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No.60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP 60/2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP 22/2015. Substansi yang diubah dalam PP 60/2014 ka PP 22/2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Formula untuk menghitung besaran dan mekanisme penyaluran dana desa diatur oleh PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK No. 274/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Sesuai dengan pasal 6 mk, dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P.
- 2) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten/kota; dan
 - b) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut "Bagian Formula"), dengan bobot sebagai berikut :
 - (1) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - (2) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - (3) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan

- (4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.³⁴

d. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni:

- 1) Tahap 1 .Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh menteri keuangan melalui Dirjen Perimbangan keuangan (DJPK)
 - a) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota.
 - b) Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian diterapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- 2) Tahap 2. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota)
 - a) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 - b) Tata cara penghitungan dan penerapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Seperti halnya pengalokasian, mekanisme penyaluran Dana Desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

³⁴ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*...,h. 211.

- 1) Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
- 2) Tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dalam Proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJP) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJP telah menerima dokumen:

- 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- 2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- 3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2.

Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencarian tahap I yang direncananya dicairkan pada setiap bulan April, 40% tahap II dibulan Agustus dan 20% dibulan Oktober. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan

Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti halnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dan desa kerekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20% untuk tahap III.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa. Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.³⁵

2. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan dana desa untuk tahun 2018 telah di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan pada ayat (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa

³⁵*Ibid.*,h. 213.

kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.³⁶

Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam pasal 5 Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) lingkungan pemukiman;
 - b) transportasi;
 - c) energi; dan
 - d) informasi dan komunikasi.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesehatan masyarakat; dan
 - b) pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

³⁶ Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4

- a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) penanganan bencana alam; dan
 - c) pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.³⁷

Sedangkan Dalam Pasal 7 Prioritas penggunaan Dana Desa di jelaskan dalam ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat

³⁷ Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 5

Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Dalam ayat (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

- 1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- 2) pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- 4) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- 5) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- 6) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- 7) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- 8) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- 9) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

10) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.³⁸

b. Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam Pasal 3 Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, disebutkan prinsip-prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yaitu:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- 2) Kebutuhan kepentingan prioritas, dengan Desa yang lebih mendahulukan mendesak, lebih langsung dengan dan berhubungan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- 3) Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan

³⁸ Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 7

- 6) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.³⁹

c. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misal pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, dan pasar. Dengan jalan ini jembatan yang baik, warga desa dapat pergi-pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar. Demikian juga, semua hasil bumi yang dihasilkan desa tersebut biasa dipasarkan dengan cepat dan dengan biaya perjalanan yang murah. Warga desa pun tidak membeli barang keperluan sehari-hari dari pasar atau dari kota dengan lancar dan biaya murah sehingga

³⁹ Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 Pasal 3

⁴⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan...*, h. 103.

harga barang-barang tersebut menjadi murah pula. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa misal pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik.⁴¹

Dalam melaksanakan pembangunan di desa, perencanaan pembangunan harus menghitung bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pembangunan jalan, penerangan jalan, jembatan, saluran irigasi, pintu air, dam, serta saluran tersier dan sekunder adalah contoh pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Demikian pula pembangunan pasar desa; pembangunan lembaga pendidikan seperti TPA, TK, SD, SMP, SMA, SMK; pembangunan gedung pertemuan warga; dan pembangunan tempat ibadah. Pembangunan yang tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga desa secara langsung hendaknya tidak dijadikan prioritas. Misalnya, pembangunan kantor kepala desa dan balai desa yang sebetulnya masih layak pakai; pembuatan gapura

⁴¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ...*, h. 104.

masuk desa yang mewah; pembuatan symbol desa; pendirian patung desa, dan lain-lain.⁴²

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur social ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efesiensi serta memperbaiki empat akses yaitu :

- 1) Akses terhadap sumber daya
- 2) Akses terhadap teknologi
- 3) Akses terhadap pasar
- 4) Akses terhadap sumber pembiayaan

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk

⁴²*Ibid.*, h. 106.

membentuk usaha bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu “koperasi”.⁴³

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bukan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumbu-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang diantara warganya.

⁴³ HAW. Widjaja, *Otonomi DESA*..., h. 169.

Dengan demikian Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya “*Develoment Community*” di mana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya Desa merupakan “*Independent Community*” yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara batas kepentingan masyarakat sendiri.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas, oleh karenanya dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi ataupun dengan pemerintah Pusat, bertindak semau sendiri dan membuat Peraturan desa tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan Otonomi Desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

dilaksanakan dalam koridor Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan Provinsi sebagai wilayah administratif sekaligus pula sebagai daerah otonom.

Pengaturan demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara Pemerintah Propinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu Kabupaten, Kota dan Desa baik arti status kewilayahan maupun dalam system dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena Kabupaten, Kota dan Desa penyusunannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat oleh wilayah Propinsi.⁴⁴

3. Kebijakan Penggunaan Dana Dalam Islam

a. Hukum Islam Tentang Prioritas Penggunaan Dana

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera Islam memiliki konsep tersendiri dimana dalam konsep tersebut harus terdapat 5 unsur *Maqashid Syariah* dan tidak boleh bertentangan dengan unsur tersebut dikarenakan jika melanggar dari 5 unsur *maqashid syariah* akan membawa keburukan yang besar dan tidak akan bias menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Kelima unsur tersebut yaitu *hifzud diin* (proteksi agama) yang berarti memberikan ruang kepada masyarakat untuk menunaikan

⁴⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi DESA...*, h. 167.

kewajiban agamanya dengan dengan baik. *Hifzun Nafs* (proteksi diri/jiwa) yang berarti memberikan perlindungan dan jaminan social masyarakat. *Hifzul Nasl* (proteksi keturunan) yang berarti pemerintah selalu memikirkan generasi yang akan datang. *Hifzul Aql* (proteksi akal) yang berarti waspada terhadap industri yang bisa merusak akal dan manusia dan menjadi sumber utama kejahatan. *Hifzu Maal* (proteksi harta) yang berarti pemerintah harus menciptakan pemerataan kekuasaan kekayaan agar sumber daya alam Negara tidak dikuasai atau dimonopoli oleh sekelompok saja.

1) Konsep Siyasa Idariyah

Menurut al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa konsep administrasi negara dan hal-hal yang terkait dengannya adalah:

- a) *Diwan* (administrasi) ketentaraan.
- b) *Diwan* (administrasi) yang mencatat data wilayah negara
- c) *Diwan* (administrasi) yang mencatat urusan pengangkatan pegawai negeri dan pemecatannya
- d) *Diwan* (administrasi) yang mencatat pemasukan dan pengeluaran baitu mal (kas negara).

Adapun yang terkait dengan judul skripsi penulis mendalami hal-hal yang berkaitan dengan alokasi danan desa, maka penulis akan membahas tentang *Diwan* (administrasi) negara

yang mencatat pengeluaran dan pemasukan *Baitul mal* (kas negara) yang terdapat pada point empat di atas.

Diwan (administrasi) keempat adalah *diwan* (administrasi) yang mencatat pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal (kas negara). Semua harta yang menjadi milik Baitul Mal, harta itu dikelola berdasarkan hak-hak Baitul Mal (kas negara), entah dimasukkan dalam penyimpanan Baitul Mal (kas negara) entah tidak. Pasalnya, Baitul Mal (kas negara) lebih bermakna tujuan dan bukan tempat. Artinya, semua hak yang menyangkut kepentingan seluruh kaum muslimin maka itu menjadi hak Baitul Mal (kas negara).

Jika ada harta yang ingin didistribusikan sesuai dengan kepentingan Baitul Mal (kas negara), pengambilannya dari prolehan *kharaj* yang dikumpulkan ke dalam Baitul Mal (kas Negara), entah tidak dimasukkan atau ia masukkan ke dalam penyimpanan Baitul Mal (kas negara). Pasalnya, semuanya yang ada kaitannya dengan tugas umat muslim atau harta yang dikeluarkan untuk umat muslim maka diberlakukan sebagai hak Baitul Mal (kas Negara). Jika demikian adanya, harta kekayaan yang dimiliki umat muslimin terbagi menjadi tiga bagian yaitu :*Fa'i*, *ghanimah*, dan *zakat*.

Fa'i termasuk hak Baitul Mal (kas negara), karena pendistribusiannya diserahkan sepenuhnya kepada pendapat dan ijtihad imam (khalifah). Adapun *ghanimah* tidak termasuk hak Baitul Mal karena ia menjadi hak para pasukan yang berhasil menang dan mendapatkannya ketika perang. Pendistribusian *ghanimah* tidak diserahkan pada ijtihad imam (khalifah). Seorang khalifah tidak boleh berijtihad melarang orang-orang yang berhak menerimanya selagi *ghanimah* tersebut tidak menjadi hak Baitul Mal.⁴⁵

Adapun seperlima dari *fa'i* dan *ghanimah* dibagi kedalam tiga bagian yaitu :

- a) Bagian pertama menjadi hak Baitul Mal (kas Negara), yaitu jatah untuk Rasulullah SAW. Yang didistribusikan untuk kepentingan umat muslimin karena pendistribusiannya diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad imam (khalifah).
- b) Bagian kedua tidak menjadi hak Baitul Mal (kas negara), yaitu jatah untuk kerabat Rasulullah SAW. Maka bagian tersebut keluar dari hak Baitul Mal (kas negara) dan penangannya tidak diserahkan kepada ijtihad imam (khalifah).

⁴⁵ Imam AlMawardi, *Al-Ahkam As-Sulthanniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bachri (Jakarta : Daar El-Kitab El Araby, 2013), h. 355.

- c) Bagian ketiga ini merupakan bagian yang pendistribusiannya masuk kedalam penjagaan Baitul Mal (kas negara), yaitu jatah untuk anak-anak yatim, musafir dan orang-orang miskin.

Adapun untuk *Zakat* dibagi dalam dua bagian :

- a) Zakat harta yang terpendam. Untuk jenis ini Baitul Mal (kas negara) tidak memiliki hak karena pemiliknya bisa mengeluarkan dan memberikan pada penerimanya.
- b) Zakat harta yang terlihat. Seperti sepuluh tanaman, hewan, buah-buahan. Menurut Imam Syafi'i zakat ini tidak termasuk hak Baitul Mal (kas negara), sedangkan menurut Abu Hanifah zakat ini termasuk Baitul Mal (kas negara).⁴⁶

2) Fiqih Maliyah

Dalam pengertian *siyasah* menurut Muhammad Iqbal Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Dengan demikian secara kebahasaan tujuan *siyasah* yaitu mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.⁴⁷ Sedangkan dalam *siyasah* Ada beberapa macam macam fikih dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam – macam fikih *siyasah* ini. Antara lain fikih *siyasah*, fikih *siyasah dusturiyah*, fikih *siyasah maliyah*, dan fikih *siyasah dauliyah*.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 356.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3.

Dalam perspektif Islam bahwa Fikih *siyasah Maliyyah* tidak akan lepas dari Al-Qur'an, hadist Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin atau khalifah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam sistem pemerintahan Islam tentu fikih *siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.⁴⁸

Secara umum fikih *siyasah maliyah* merupakan fiqih yang mengatur sumber sumber keuangan Negara, dan mengatur mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, baitulmal, hak hak orang miskin dan perbankan. Di dalam fikih *siyasah maliyah* kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan menjadi bagian yang difokuskan dalam fiqih *siyasah maliyah*. Dalam secara etimologi fikih *siyasah maliyah* adalah mengatur politik keuangan.⁴⁹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka

⁴⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

⁴⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel press, 2014), h. 91.

ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang iningin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran tidak boleh memlakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran.⁵⁰ Dan darisini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip – prinsip sebagai beriku :

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia.⁵¹

Dalam fikih siyasah maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa

⁵⁰ H. Amir syarifudin, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014) h. 225-226.

⁵¹ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), h. 64.

contoh sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam alquran surat Al-hasyr : 7.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ فَلِلَّهِ الْقُرَىٰ أَهْلٌ مِّن رَّسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءٌ مَّا
 ءَاتَاكُمْ وَمَا مِّنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءٌ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّيْلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَ
 الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ وَتَقْوَاهُ أَفَاتَتْهُوَ عَنْهُ هُنَّكُمْ وَمَا فَخَذُوا الرَّسُولَ



Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Dan fikih siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersakutandengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yangsesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqih siyasah maliyahsebagai berikut :

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang orang miskin alah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa.” (HadistRiwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

“siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.”(Hadist RiwayatAhmad).

Hadis dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

Al-Qur'an dan hadis yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁵² Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus diaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntukan masalah masalah ekonomi apa yang dihadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan segala harta.⁵³ kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut:

⁵² Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal akuntansi dan Pajak*, 02 (januari, 2014), h. 39-41.

⁵³ *Ibid.*, h. 41.

- 1) Untuk orang fakir miskin.
- 2) Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Untuk meningkatkan supermasi hukum.
- 4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- 5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
- 6) Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik .
- 7) Untuk meningkatkan kesehatab masyarakat.
- 8) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

b. Praktik Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Pada Masa Rasulullah

Sumber penerimaan pada masa Rasulullah dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni dari kaum muslim, dari nonmuslim, dan dari sumber lain. Dari golongan muslimin terdiri atas: *zakat, ushr, zakat fitrah, wakaf, amwal fadhla, nawaib*, dan tentu saja *shadaqah* seperti *qurban* dan *kafarat*. Dari kaum non muslim terdiri atas: *jizyah, kharaj*, dan *ushr*. Sedangkan dari sumber-sumber lain, misalnya: *ghanimah, fay*, uang tebusan, hadiah dari pemimpin dan

Negara lain, pinjaman dari kaum muslimin dan non muslim.⁵⁴ Sistem ekonomi yang dibangun Rasulullah berbasis pada empat pendapatan utama untuk pemerataan kekayaan dan pelayanan publik. Empat pendapatan ini merupakan *zakat*, sedekah, *ghanimah*, dan *jizyah*. Zakat dan sedekah langsung diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sementara *ghanimah* dan *jizyah* diberikan kepada pemerintah untuk digunakan berbagai keperluan publik.⁵⁵

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah SAW dan yang kemudian diteruskan para sahabatnya, yaitu para petugas mengambil zakat dari para muzaki, atau muzaki sendiri sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada baitulmal, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada mustahik. Rasulullah ketika mengutus Muadz bin Jabal untuk mengurus zakat orang Yaman, Beliau mengatakan: "Apabila mereka patuh kepadamu untuk berikrar dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka." Satu hal yang paling substansial dalam penyaluran zakat masa Rasulullah tidak pernah menunda penyaluran zakat. Bila zakat diterima pagi hari, maka sebelum siang hari tiba Rasulullah telah membagikannya. Bila zakat diterima disiang hari maka sebelum malam hari, zakat yang diterima

⁵⁴ Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : Kencana, 2014), h. 162.

⁵⁵ Nurul Huda et al. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta : Kencana, 2015), h. 54.

tersebut telah disalurkan kepada para *asnaf*. Sehingga sifat penyaluran zakat masa Rasulullah adalah segera dan dibagikan tanpa sisa.⁵⁶

Untuk Belanja pemerintah pada zaman Rasulullah meliputi untuk hal-hal pokok yang meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat dan *ushr* untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang Negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan untuk hal yang sifatnya sekunder diperuntukan bagi: bantuan orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang orang meninggal dalam keadaan miskin.

Untuk mengelola sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara, maka Rasulullah menyerahkan kepada baitulmal dengan menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*), artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara (*government expenditure*).

Dasar-dasar kebijaksanaan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar *kharaz*, *ushr*, *jizyah* dan *kafarat*, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (nisab), umur objek terkena kewajiban (*haul*), dan tarifnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung beberapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan

⁵⁶ Nurul Huda et.al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 173.

sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa (*self assessment*). Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang belandaskan keadilan, sejak masa awal pemerintahan Islam. Setelah Rasulullah wafat, kebijaksanaan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya.⁵⁷

c. Praktik Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Pada Masa Khulafaur Ar Rasyidin

1) Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq (51 SH-13 h/573-634 M)

Pengangkatan Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi masalah bagi kaum Muhajirin dan Ansor (*konflik internal*) serta munculnya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Para pemberontak berasal dari dua kelompok, kelompok pertama terdiri dari mereka yang kembali balik menyembah berhala di bawah pimpinan Musailamah, Tulaihah, Sajah dan lain-lain. Kelompok kedua tidak menyatukan permusuhan terhadap Islam tetapi hanya memberontak kepada Negara. Mereka menolak membayar zakat dengan dalih bahwa pembayaran itu hanya sah kepada Nabi, satu-satunya orang yang merek siap membayarnya. Berdasarkan pada kondisi di atas, maka langkah pertama yang dilakukan semasa pemerintahan Abu Bakar adalah menumpas pembangkangan suku-suku Arab di dalam negeri

⁵⁷ Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam*..., h. 162.

melalui peperangan yang disebut Perang Riddah(peperangan melawan kemurtadan) baru melakukan perluasan wilayah.

Langkah yang dilakukan Abu Bakardalam menyempurnakan ekonomi Islam:

- a) Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat, seperti yang dikatakan Anas (seorang amil) bahwa: jika seseorang yang harus membayar unta betina berumur satu tahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina berumur dua tahun, hal tersebut dalam diterima. Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan pembayaran). Dalam kesempatan lain Abu Bakar juga menginstuksikan kepada amil yang sama, kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak bias dipisahkan (dikhawatirkan akan kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat).
- b) Pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab baitulmal (Abu Ubaida)
- c) Menetapkan konsep *balance budget policy* pada *baitulmal*.
- d) Melakukan penegakan hokum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.

e) Secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan.⁵⁸

Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum Muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.⁵⁹

2) *Khlfah Umar bin Khatab (40 SH-23 H/584-644 M)*

Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam, kalau boleh dikatakan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi sistem ekonomi yang dikembangkan berdsarkan kepada keadilan dan kebersamaan dan di sinilah letak ketinggian ajaran Islam. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengambilan sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagiakan kepada orang-orang miskin. Faktor-faktor produksi yang dimiliki tidak berada dalam

⁵⁸ Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam*..., h. 163.

⁵⁹ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi 2*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 57.

kekuasaan individu. Semua factor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi berada pada komunitas.⁶⁰

Kontribusi yang diberikan Umar untuk menegmbangkan ekonomi Islam:

- a) Reorganisasi baitulmal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan *al-Divan* (sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjanagan angkatan perang dan pension dan tunjangan-tunjangan lain.
- b) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negaranya.
- c) Divervisikasi terhadap objek zakat (zakat terhadap karet di Semenanjung Yaman), tariff zakat (misalnya, mengenakan dasar *advalorem*, satu dirham untuk 40 dirham).
- d) Pengembangan *Ushr* (pajak) pertanian (misalnya, pembebanan sepersepuluh hasil pertanian).
- e) Undang-undang perubahan kepemilikan tanah (*land reform*)
- f) Pengelompokan pendapatan Negara dalam 4 bagian.

SUMBER PENDAPATAN	PENGELUARAN
Zakat dan <i>Ushr</i>	Pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan
<i>Khums</i> dan Sadaqah	Fakir miskin dan kesejahteraan
<i>Kaharaj, fay, jizyah, Ushr,</i>	Dana pensiun, dana pinjaman

⁶⁰ Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam*, h. 164.

sewa tetap	(<i>allowance</i>)
Pendapatan dari semua sumber	Pekerja, pemelihara anak terlantar dan dana social

Menurut Adiwarman A. Karim dalam bukunya pada masa Zaman Umar Bin Khattab di sisi pengeluaran, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian besar. Umar ibnul khaththab memerintahkan Amr ibn Abdil Amr ibn Ash, gubernur mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk hal ini. Dia melakukan penggalian kanal dari fustat (kairo) ke Suez untuk memudahkan transportasi dagang antara semenanjung Arab dan Mesir. Juga pembangunan dua kota bisnis: Kufah (untuk bisnis dengan romawi) dan Basrah (bisnis dengan persia).⁶¹

3) *Khalifah Usman bin Affan (47 SH-35H/577-656 M)*

Pada awalnya pemerintahan Usman mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijaksanaan yang dijalankan khalifah Umar. Pada enam tahun kepemimpinannya hal-hal yang dilakukan:

- a) Pembangunan pengairan.
- b) Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan.
- c) Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum.

⁶¹Adiwarman A.Karim,*Ekonomi Islam ...*, h. 26.

- d) Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham.
- e) Selama enam tahun terakhir dari pemerintahan Usman situasi politik negara sangat kacau. Kepercayaan terhadap pemerintahan Usman mulai berkurang dan puncaknya rumah Usman dikepung dan beliau dibunuh dalam usia 82 tahun.

4) *Khalifah Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H/600-661 M)*

Ali berkuasa selama lima tahun, sejak awal Ali selalu mendapat perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya, yaitu kaum Khawarij dan peperangan yang berkepanjangan dengan muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harith, dimana surat yang tersebut mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap pegawai administrasi dan pengadaan bendahara.

Beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa Khalifah Ali antara lain:

- a) Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitulmal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan.
- b) Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
- c) Adanya kebijakan pengetatan anggaran.

Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan.⁶²

B. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustanir dan Darmiah yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, menyimpulkan Implementasi kebijakan dana Desa dengan nilai 69,78 % kategori baik. Partisipasi masyarakat dengan nilai 68,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Pembangunan desa dengan nilai 71,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik.⁶³

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustanir dan Darmiah fokus pada implementasi kebijakan Dana Desa di pandang dari hukum positif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada implementasi prioritas penggunaan Dana Desa di

⁶² Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam...*, h. 165.

⁶³ Ahmad Mustanir, Darmiah, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016*, h. 236.

pandang dari hukum positif dan hukum Islam pada Pekon Bangun Negara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” menyimpulkan Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapurkejamboon Tahun 2014 bahwa pemanfaatan alokasi dana desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan saluran batu kali, terbukti dengan adanya pelaksanaan pembangunannya yang sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan Alokasi Dana Desa yang berbentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPMD, hal ini dapat diharapkan programnya akan memberikan kesadaran.⁶⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas fokus pada akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada implementasi dan

⁶⁴ Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, h. 237

pertanggungjawaban prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masiyah Kholmi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang” menyimpulkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015. Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masya-rakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan ADD 30 % untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksana-an kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan. Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah desa yang belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Mengatasi kurangnya pema-haman aparatur desa dalam meng-implementasikan program ADD, maka perlu adanya pelatihan pengelolaan ADD dari tim pendamping tingkat kecamatan

kepada pelaksana teknis pengelolaan ADD. Keterbatasan penelitian ini pada satu desa dan penggalian data hanya pada aparatur pemerintah desa dan tidak bersumber pada masyarakat desa yang terkait dan aparatur Kecamatan yang bertanggungjawab pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.⁶⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Masiyah Kholmi fokus pada akuntabilitas Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015 Kabupaten Jombang, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada implementasi dan pertanggungjawaban prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2017 pada Pekon Bangun Negara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Inten Meutia dan Lilian dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dana Desa” menyimpulkan Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah sesuai dengan prosedur

⁶⁵ Masiyah Kholmi, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”, *Ekonomika-Bisnis Vol. 07 No. 02 Bulan Juli Tahun 2016*, h. 150.

yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa.

Kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Berkenaan dengan aspek pengelolaan keuangan secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan telah mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Berkenaan dengan aspek penatausahaan secara umum hampir semua desa telah dapat menjalankan aspek penatausahaan dengan baik. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkaitan dengan komposisi belanja desa, semua desa yang diteliti tidak memenuhi komposisi belanja desa sesuai aturan 70% yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berbanding 30% dari total anggaran belanja desa dipergunakan bagi pendapatan dan tunjangan kades dan perangkatnya, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan insentif RT/RW. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan sehingga

tidak memberikan multiplier effect bagi masyarakat desa dalam pembangunan.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Inten Meutia dan Liliana fokus pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada implementasi dan pertanggungjawaban prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 pada Pekon Bangun Negara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriah dan Utia Meylinayang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa” menyimpulkan Indonesia telah memiliki regulasi yang sudah cukup signifikan terkait dana desa diantaranya: Undang- Undang Desa, dan delapan peraturan lain yang terkait langsung dengandana desa. Bukan hanya itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur terkait dengan sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secaraberlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai leadinginstitution pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sementara di tingkat pusat, BPK dan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangandes secara sampling. Dana desa menjadi ranah pengawasan mereka dikarenakan dana desa adalah uang negara yang

⁶⁶ Inten Meutia Liliana, “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 8 Nomor 2 tahun 2017*, h. 350.

bersumber dari APBN sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk memantau pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dana desa, pemerintah pusat juga telah membentuk tim pengendali dana desa yang beranggotakan pejabat lintas kementerian.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan oleh fokus pada system pengelolaan keuangan Dana Desa yang diawasi oleh Inspektorat Daerah dan BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada penggunaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ,Sejahtera. Desa Sindon adalah sebuah alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini serupa dengan model yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendirikan Grameen Bank atau Bank Desa yang mengembangkan konsep kredit mikro untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum. Dalam

⁶⁷ Siti Khoiriah, Utia Meylina, “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 8 Nomor 2 tahun 2017*, h.28.

penelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti : pembangunan gedung serbaguna, pembangunan jalan, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk pengembangan social ekonomi masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa menggunakan sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syari'ah. Karena setiap peminjam dana BUMDes dikenakan bunga sebesar 1,25% per bulan atau setiap kali angsuran.

Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah bunga pinjaman tersebut termasuk dalam kategori riba, hal ini juga tentu adanya unsur kezaliman karena besaran bunga yang mencapai 15% setiap tahun. Sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. Perbedaan dengan dari skripsi yang di tulis oleh Mirza Iskandar Putra. Sementara ini yang akan di tulis dalam skripsi ini tentang bagaimana pengelolaan dari dana desa itu sendiri sebagai kesejahteraan umum masyarakat dan bagi desa dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, penulis juga memadukan dengan pendapat

para ahli Fikhih Siyasah Maliyah dalam membahas tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan umum.⁶⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Putrafokus pada pengelolaan Dana Desa dipandang dari sudut Ekonomi Syariah, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni lebih fokus pada prioritas penggunaan Dana Desa di pandang dari hukum Islamatau *Fiqih Maliyah* pada Pekon Bangun Negara.

⁶⁸ Mirza Iskandar Putra, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*, (*Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017)

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pekon Bangun Negara

Pekon Bangun Negara terletak di kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sejarah terbentuknya Pekon Bangun Negara berawal pemekaran dari Pekon Way Jambu. Pada tanggal 27 juni 2007 Horizon sebagai Pejabat Peratin, tahun 2008 Bupati Lampung Barat Drs. H. Muklis Basri meresmikan pekon persiapan mengadakan pemilihan peratin definitive dimenangkan oleh Arif Santoso yang sebelumnya menjabat peratin Way Jambu (2004-2010) yang mengundurkan diri dan maju sebagai calon peratin Bangun Negara yang memang berdomisili di pekon persiapan Bangun Negara.

15 hari kemudian peratin terpilih Arif Santoso dilantik Drs. H. Muklis Basri periode (2009-2015).

Nama-Nama Peratin dari periode ke periode

- 1) Horizon (2007-2009)
- 2) Arif Santoso (2009-20015)
- 3) Ermansyah (2015-2016)
- 4) Ohpir Patirin (2017-2022)⁶⁹

Setelah mengalami pemekaran hingga kini Pekon Bangun Negara resmi terdiri dari tujuh dusun. Berikut tujuh dusun dengan kepala dusun yaitu

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Peratin Bangun Negara, Bpk. Ohpir Patirin, 5 Agustus 2019

- 1) Dusun Kerbang Tinggi 1 : Hazani
- 2) Dusun Kerbang Tinggi 2 : Mat Hirzan
- 3) Dusun Pasar Senin : Dedi Satria
- 4) Dusun Pagar Baru : Sopnir
- 5) Dusun Sumber Sari 1 : Suprpto
- 6) Dusun Sumber Sari 2 : Yamo
- 7) Dusun Sumber Rejo : Dedi Saputra⁷⁰

2. Kondisi Geografis Dan Demografis Pekon Bangun Negara

a. Geografis Pekon Bangun Negara

Pekon Bangun Negara merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Secara geografis Pekon Bangun Negara. Pekon Bangun Negara memiliki luas sekitar 1.111 Hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Tanjung Raya;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Samudera Hindia;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Marang dan;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan pekon Way Jambu.

Mayoritas lahan di Pekon Bangun Negara dimanfaatkan untuk pemukiman persawahan dan perkebunan. Beberapa sarana yang menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat seperti sarana pendidikan berupa Sekolah tingkat Menengah Pertama sebanyak satu,

⁷⁰ Hasil wawancara dengan sekdes Bangun Negara, Bpk. Ermansyah, 06 Agustus 2019

Sekolah Dasar sebanyak satu. Sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 4 buah. Sarana kesehatan dan olahraga berupa Posyandu, lapangan bola kaki, lapangan bola voli dan tennis meja. Dan sarana lainnya berupa SPBU, Tempat Pemakaman Umum.⁷¹

b. Demografis Pekon Bangun Negara

1) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Pekon Bangun Negara terdapat 5.182 dengan 1.023 kepala keluarga. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan wilayah yaitu Dusun Kerbang Tinggi 1 terdapat 1.171 Orang, Kerbang Tinggi 2 581 Orang, Sumber Sari 1 837 Orang Sumber Sari 2 801 Orang, Sumber Rejo 401 Orang, Pagar Baru 450 Orang, Pasar Senin 941 Orang. Dan secara keseluruhan penduduk pekon Bangun Negara merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).⁷²

2) Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk di Pekon Bangun Negara bermata pencaharian sangat beragam yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani, pengusaha kecil dan menengah, wiraswasta dan lain sebagainya.

⁷¹ Hasil wawancara sekdes Bangun Negara, Bpk. Ermansyah, 06 Agustus 2019

⁷² “Profil Pekon Bangun Negara” (On-Line), tersedia di :
www.bangunnegara.wopdpres.com (06 Agustus 2019)

3) Keadaan Sosial dan Budaya

Penduduk Pekon Bangun Negara merupakan Pekon yang memiliki latar belakang yang beragam. Dalam penganut keagamaan, Mayoritas penduduk Bangun Negara adalah pemeluk agama Islam, sedangkan penduduk minoritas adalah penganut agama Budha. Selain dari itu penduduk Pekon Bangun Negara juga mayoritas suku lampung dan sunda, sedangkan minoritasnya adalah suku bali.⁷³

3. Organisasi Pemerintahan Pekon Bangun Negara

Pekon Bangun Negara memiliki organisasi pemerintahan resmi pada saat ini yakni periode 2017-2022 yang terdiri dari:⁷⁴

- a. Peratin : Ohpir Patirin
 - 1) Kasi Pemerintahan : Ahmad Kahpi
 - 2) Kasi Kesra : Supriyadi
 - 3) Kasi Pelayanan : Yodi S, S.Pd.
- b. Sekretaris Pekon : Ermansyah
 - 1) Kaur TU dan Umum : Riswandi
 - 2) Kaur Keuangan : Insan Sukri
 - 3) Kaur Perencanaan : Kurniawan S.Pd
- c. Bendahara Pekon : Ahmad Hirzan

⁷³ Hasil Wawancara dengan Peratin Bangun Negara, Bpk. Ohpir Patirin, 07 Agustus 2019

⁷⁴ Kantor Balai Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Pekon Bangun Negara memiliki lembaga himpun pemekon yang terdiri dari:

- a. Ketua : Rohmadi Wiyono
- b. Wakil Ketua : Yazid Bustami
- c. Sekretaris : Azmi Amdani
- d. Bendahara : Almirdad
- e. Anggota : Azuan Tohir

Struktus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon Bangun Negara:

- a. Ketua : Sunarto
- b. Wakil Ketua : Mulyadi
- c. Sekretaris : Nurul Hadi
- d. Bendahara : Pahrizal
- e. Anggota : Bukhori dan Anton Gunawan

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Bangun Negara Periode 2018

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan tujuan utama dari prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam peraturan menteri desa no. 19 Tahun 2017. Hal ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa. Dengan demikian Pekon Bangun Negara yang merupakan salah satu Pekon penerima Dana Desa secara rutin tentu

memiliki kebutuhan mendasar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan Dana Desa tersebut Pekon Bangun Negara dapat merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (APBPek) tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (APBPek)
Pekon Bangun Negara 2018

No		Uraian	Anggaran	Ket
1.		Pendapatan Transfer	1.181.457.000	
	1.	<i>Dana Desa</i>	792.084.000	DD
	2.	<i>Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten</i>	9.231.000	BHP
	3.	<i>Alokasi Dana Desa</i>	374.142.000	ADD
	4.	<i>Bantuan Provinsi</i>	6.000.000	BKP
2.		Belanja		
	1.	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	647.593.350	DD
	1.	Pembangunan Drainase 150 m x 0,5x0,3 m.	70.024.700	DD
	2.	Pembangunan Rabat Beton P=150 m x L= 3 m x T=0,15 m	160.285.600	DD
	3.	Pembukaan Badan Jalan+sirtu P = 472m x L=5m, timbunan 15cm	278.077.950	DD
	4.	Gorong-gorong Plat Beton 1,3 x 1m x 6m, type 50	17.930.500	DD
	5.	Pembangunan Sumur Galian 5 m	8.111.700	DD
	6.	MCK 2 unit + Septi tank 3 m x 2 m	30.399.350	Silpa
	7.	Pembangunan TPT 745 m, T 30 cm	52.525.450	DD
	8.	Pembangunan TPT 50 m, T= 1,5 m	30.399.350	DD
	2.	<i>Bidang Pemberdayaan</i>	174.890.000	DD

		Masyarakat		
	1.	Sosialisasi Pangan Yang Sehat dan Aman	28.988.550	DD
	2.	Bantuan Insentif untuk Guru Ngaji	24.000.000	DD
	3.	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	12.916.000	DD
	4.	Penguatan Permodalan Bum-Des	60.000.00	DD
	5.	Penganggaran Penyusunan Profil Pekon	5.732.950	DD
	6.	Kegiatan pengembangan system administrasi keuangan dan asset pekon berbasis digital	2.320.000	DD
	7.	Penyelenggaraan musyawarah pekon	11.029.500	DD
	8.	Kegiatan pelatihan usaha tani	23.020.000	DD
	9.	Peningkatan kapasitas Bum-Des	6.883.000	DD
		Surplus/Defisit	30.399.350	

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPek) 2018

Tabel 3.1 di atas merupakan bagian dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon tahun 2018 yang mencakup rencana penggunaan Dana Desa untuk Pekon Bangun Negara. Sebagaimana yang tercantum pada tabel di atas pemerintah atau aparat Pekon Bangun Negara telah merencanakan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara Pekon, Bapak Ahmad Hirzan mengatakan:

“Pembangunan yang direncanakan pemerintah Pekon Bangun Negara merupakan pembangunan yang mendesak untuk mencegah dampak berbagai kerusakan baik lahan, infrastruktur dan fasilitas

umum.Selain dari itu pembangunan di Pekon Bangun Negara berupa infrastruktur bertujuan untuk pelayanan guna kelancaran distribusi kegiatan masyarakat Pekon Bangun Negara dalam meningkatkan potensi Pekon di bidang Sumber Daya Alam maupun ekonomi. ”⁷⁵

Pembangunan yang direncanakan sebagaimana tercantum pada APBPek Bangun Negara adalah pembangunan drainase, rabat beton, pembukaan badan jalan, gorong-gorong, sumur, kamar mandi (MCK), dan Tembok Penahan Tanah (TPT). Pembangunan tersebut merupakan rencana yang akan dibangun di Pekon BangunNegara pada tahun 2018 dengan menggunakan Dana Desa Tahun 2018 kecuali pembangunan MCK menggunakan dana silpa atau dana desa yang tersimpan di kas Pekon Bangun Negara tahun 2017. Rencana pembangunan Pekon Bangun Negara Tahun 2018 di anggarkan mencapai Rp. 647.593.350,- yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 617.194.000 dan silpa sebesar Rp. 30.399.350,-.Dengan demikian pembangunan Pekon Bangun Negara menggunakan 77,2% dari Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat.

Penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk pembangunan, Pekon Bangun Negara menggunakan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat.Tujuan dari pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara adalah untuk menciptakan atau membentuk individu dan masyarakat yang mandiri baik mandiri secara berpikir, bertindak dan berkreasi dalm mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain dari itu

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bendahara Pekon Bangun Negara, Bpk. Ahmad Hirzan, 08 Agustus 2019

pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara juga memberikan fasilitas untuk menunjang proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Anggaran belanja Pekon Bangun Negara di Bidang pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam table 3.1 di atas berupa sosialisasi pangan yang sehat dan aman, bantuan insentif untuk guru ngaji, kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga, penguatan permodalan bum-des, penganggaran penyusunan profil pekon, kegiatan pengembangan system administrasi keuangan dan asset pekon berbasis digital, penyelenggaraan musyawarah pekon, kegiatan pelatihan usaha tani, dan peningkatan kapasitas bum-des. Hal tersebut merupakan anggaran yang di rencanakan untuk direalisasikan pada tahun 2018. Penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara dianggarkan sebesar Rp.174.890.000,- atau 22,8% dari Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat.

2. Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Pekon Bangun Negara Periode 2018

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 BAB VI pasal 24 ayat (1) menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/walikota setiap semester. dengan demikian setiap Desa berkewajiban untuk membuat laporan realisasi dengan tujuan telah terpenuhi kegunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagaimana Pekon Bangun Negara yang telah menerima Dana Desa telah mengeluarkan laporan

relaisasi penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPek) 2018 berikut:

Tabel 3.2
Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon (APBPek)
Pekon Bangun Negara 2018

No .	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
			(Rp)	(%)	
1.	Pendapatan				
1.1	Dana Desa	792.084.000	792.084.000	100	DD
2.	Belanja				
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	647.593.350	647.593.350	100	DD
1.	Pembangunan Drainase 150 m x 0,5 x 0,3 m.	70.024.350	70.024.350	100	DD
2.	Pembangunan Rabat Beton P=150 m x L= 3 m x T=0,15 m	160.285.600	160.285.600	100	DD
3.	Pembukaan Badan Jalan+sirtu P = 472m x L=5m, timbunan 15cm	278.077.950	278.077.950	100	DD
4.	Gorong-gorong Plat Beton 1,3 x 1m x 6m, type 50	17.930.500	17.930.500	100	DD
5.	Pembangunan Sumur Galian 5 m	8.111.700	8.111.700	100	DD
6.	MCK 2 unit + Septi tank 3 m x 2 m	30.399.305	30.399.305	100	Silpa
7.	Pembangunan TPT 745 m, T 30 cm	52.525.450	52.525.450	100	DD
8.	Pembangunan TPT 50 m, T= 1,5 m	30.238.100	30.238.100	100	DD
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	174.890.000	174.890.000	100	DD
1.	Sosialisasi Pangan Yang Sehat dan Aman	28.988.550	28.988.550	100	DD
2.	Bantuan Insentif untuk Guru Ngaji	24.000.000	24.000.000	100	DD
3.	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	12.916.000	12.916.000	100	DD
4.	Penganggaran	5.732.950	5.732.950	100	DD

	Penyusunan Profil Pekon				
5.	Kegiatan pengembangan system administrasi keuangan dan asset pekon berbasis digital	3.230.000	3.230.000	100	DD
6.	Penyelenggaraan musyawarah pekon	11.029.500	11.029.500	100	DD
7.	Keiatan pelatihan usaha tani	.23.020.000	.23.020.000	100	DD
8.	Peningkatan kapasitas Bum-Des	6.883.000	6.883.000	100	DD
	Surplus/Defisit	30.399.350	30.399.350		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPek) 2018

Tabel 3.2 di atas merupakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara Tahun 2018. Pada bidang pembangunan sebagaimana yang di anggarkan dalam ABPek 2018 yang bersumber dari Dana Desa 2018 yakni pembangunan drainase, rabat beton, pembukaan badan jalan, gorong-gorong, sumur, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) semuanya telah terealisasi 100% dari rencana pembangunan 2018. Sedangkan pembangunan kamar mandi (MCK) yang bersumber dari dana silpa juga telah terealisasi 100%. Dengan demikian pembangunan di Pekon Bangun Negara telah sesuai harapan dalam rencana yang ditetapkan oleh pemerintah Pekon Bangun Negara. Selain itu Bendahara Pekon menyampaikan bahwa:

“Penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara telah digunakan sepenuhnya tanpa ada kekurangan dan kelebihan dari Dana Desa. Dari pembangunan yang berupa infrastruktur ini masyarakat

Pekon Bangun Negara telah menikmati dan mempermudah aktifitas sehari-hari.”⁷⁶

Pembangunan di Pekon Bangun Negara pada tahun 2018 lebih fokus pada pembangunan di dusun pasar senin, pagar baru, dan kerbing tinggi 1 dikarenakan pembangunan dilakukan secara bertahap setiap dusun. Hal ini dikarenakan Dana Desa yang diterima pada tahun 2018 tidak dapat digunakan secara keseluruhan untuk pembangunan di setiap dusun. Namun penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara di implementasikan pada pembangunan yang menunjang dan bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana, menunjang aktifitas masyarakat dalam kegiatan perekonomian serta kemudahan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Berikut pembangunan yang telah dilaksanakan:



Gambar 4.1
Pembangunan Drainase

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bendahara Pekon Bangun Negara, Bpk. Ahmad Hirzan, 08 Agustus 2019

Pembangunan drainase dilakukan pada dusun Pagar Baru, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala dusun Pagar Baru, Bpk. Sopnir;

“Pembangunan drainase di dusun Pagar Baru ini dilakukan pada tahun 2018 sesuai dengan rencana pembangunan yang disetujui pada musyawarah Pekon, hal ini Pagar Baru menjadi prioritas karena pembangunan ini bertujuan untuk mencegah genangan air pada dataran rendah, sebab ketika hujan deras yang pernah terjadi pada tahun 2011 dan 2014 mengakibatkan genangan air yang besar dan banjir, maka dari itu drainase ini dibuat untuk mengalirkan air ke aliran yang rebih rendah seperti rawa atau sungai”⁷⁷



Gambar 3.2
Pembangunan Rabat Beton



Gambar 3.3
Pembangunan Pembukaan Jalan



Gambar 3.4
Pembangunan MCK 2 Unit



Gambar 3.5
Sumur Galian

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun Pagar Baru via telpon, Bpk. Sopnir, 07 September 2019

Pembangunan rabat beton, pembukaan jalan, sumur galian, dan MCK dilakukan pada dusun Pasar Senin, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk. Dedi Satria;

“Pembangunan rabat beton dilakukan menuju jalan ke pemakaman umum hal ini dilakukan karena jarak pemakaman yang cukup jauh dan jalanan berpasir halus, maka dengan pembangunan ini masyarakat jadi lebih mudah mengakses jalannya. Untuk pembangunan MCK 2 unit dan sumur galian dilakukan karena kurangnya fasilitas umum bagi masyarakat dusun Pasar Senin, sebab ketika setiap hari senin ada pasar, kebanyakan para pedagang, pembeli maupun warga membutuhkan tempat pembuangan yang layak. Sedangkan pembangunan pembukaan jalan dilakukan agar terhubungnya akses jalan pasar ke pemukiman warga atau ke perkebunan warga menjadi mudah. Dari semua pembangunan itu telah sesuai apa yang direncanakan pada musyawarah Pekon Bangun Negara”⁷⁸



Gambar 3.6
Pembangunan Gorong-gorong dan TPT

Pembangunan gorong-gorong dan TPT dilakukan pada dusun kerbing tinggi 1, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk. Hazani:

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun Pasar Senin via telpon, Bpk. Dedi Satria, 07 September 2019

“Pembangunan dilakukan karena memang membutuhkan untuk memudahkan akses jalan, memudahkan aliran air, mencegah kerusakan tanah. Pembangunan ini telah sesuai apa yang di rencanakan pembangunan tahun 2018 ketika musyawarah pekon”⁷⁹

Pembangunan yang dilaksanakan pada dusun Pagar Baru, dusun Pasar Senin, dusun Kerbang Tinggi 1 merupakan bentuk apresiasi dan bantuan pemerintah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat. Sedangkan dusun lain pada Pekon Bangun Negara telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menunggu giliran untuk taghun selanjutnya. Hal demikian telah disampaikan oleh setiap kepala dusun dengan pendapat yang senada.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara sebagaimana yang dianggarkan dalam APBPek 2018 maka table 3.2 merupakan laporan relisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan realisasi berupa Sosialisasi Pangan Yang Sehat dan Aman, Bantuan Insentif untuk Guru Ngaji, Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga, Penganggaran Penyusunan Profil Pekon, Kegiatan pengembangan system administrasi keuangan dan asset pekon berbasis digital, Penyelenggaraan musyawarah pekon, Kegiatan pelatihan usaha tani, dan Peningkatan kapasitas Bum-Des telah mencapai 100% atau digunakan sebagaimana mestinya. Namun pada bidang pemberdayaan masyarakat yang berupa penguatan permodalan BUM-Des sebagaimana yang tercantum pada laporan realisasi APBPek 2018 (terlampir) telah

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun Kerbang Tinggi 1 via telpon, Bpk. Hazani, 07 September 2019

dimasukkan pada pembiayaan Pekon Bangun Negara. Dengan demikian dari berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara 2018 dapat bermanfaat dan memberikan terobosan baru dalam melakukan kegiatan mandiri secara individu maupun masyarakat.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Pekon Bangun Negara 2018 telah dilaksanakan dengan baik. Menurut Ketua Lembaga Himpun Pemekonan, Bapak Rohmadi Wiyono mengatakan:

“Lembaga Himpun Pemekonan atau sama dengan Badan Permusyawaratan Desa di Pekon Bangun Negara telah mengikuti sesuai aturan dimana LHP selain dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon Bangun Negara, LHP juga terlibat dalam merencanakan dan menyepakati rencana pembangunan serta mengawasi pelaksanaannya. Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 pada Pekon Bangun Negara telah direncanakan dan dikaji secara matang oleh pemerintah Pekon, bahkan pada pelaksanaannya juga kami awasi. Sebagai yang tercantum dari laporan realisasi penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu adalah bentuk implementasinya.”⁸⁰

Lembaga Himpun Pemekonan memiliki perannya tersendiri pada Pekon Bangun Negara sebagaimana yang diatur dalam UU Desa No 6 Tahun 2014. Sedangkan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Pekon Bangun Negara dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada RPJM Desa. Pekon Bangun Negara salah satu Pekon yang diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Dalam musrenbang Pekon Bangun Negara, Peratin Ohpir Patirin mengatakan:

⁸⁰ Hasil wawancara dengan ketua LHP via telpon, Bpk. Rohmadi Wiyono, 08 September 2019

“Dalam forum musrenbang ini melibatkan pemerintah pekon dari jajarannya yakni peratin, sekdes, bendahara, kepala kaur dan kasi, selain itu juga kepala dusun diikuti sebagai wakil elemen masyarakat. Serta Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang tidak lain adalah BPD. Dari musyawarah inilah dibahas terkait pembangunan, penggunaan Dana Desa, dan hasil musyawarah ini di masukkan dalam RKP Desa, APBPekon. Untuk pengambilan keputusan pembangunan di sesuaikan kebutuhan masyarakat perdusun dan mendesak.”⁸¹

Musrenbang yang dilakukan pada Pekon Bangun Negara adalah proses dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan oleh pemerintah Pekon. Peratin Ohpir Patirin menyampaikan bahwa :

“Setiap musyawarah Pekon bangun Negara di adakan, pihak-pihak merencanakan pembangunan, belanja Pekon, maupun penggunaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi dan dana bantuan itu semua harus mengacu pada peraturan Bupati Pesisir Barat dan Peraturan Menteri Desa. Untuk alokasi penggunaan APBPekon pemerintah kabupaten menetapkan minimal 30% untuk pembangunan, 30% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa”⁸²

Perencanaan dan Penggunaan dana APBPek Bangun Negara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan pada publikasi informasi penggunaan Dana Desa Pekon Bangun Negara Peratin Ohpir Patirin menyampaikan:

“Bagi pihak atau masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan Dana Desa maka kami memberikan informasi tersebut selama dapat dipertanggung jawabkan. Misal bila ada penelitian mahasiswa, permintaan masyarakat ingin mengetahui secara detail

⁸¹Hasil Wawancara dengan Peratin Bangun Negara, Bpk. Ohpir Patirin, 07 Agustus 2019

⁸²Hasil Wawancara dengan Peratin Bangun Negara, Bpk. Ohpir Patirin, 07 Agustus 2019

maka kami melayani dengan menjaga informasi tanpa disalahgunakan. Untuk memprolehnya masyarakat bisa datang aparat pemerintah Pekon yang berkaitan seperti Sekdes, Bendahara namun dengan persetujuan dari Peratin juga karena pihak pemerintah Pekon Bangun Negara melakukan ini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.”⁸³

⁸³*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program kegiatan dan rencana pembiayaan yang di bahas dalam musrembang dan setuju bersama oleh pemerintah desa dan BPD serta ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib mebuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggaranya.⁸⁴

Dalam mengelola Dana Desa harus mengikuti peraturan yang ada di dalam Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Mentri Dalam Negeri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk

⁸⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa...*, h. 85.

mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.⁸⁵

Dalam pasal 72 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur pengelolaan keuangan desa pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

⁸⁵ <http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/>, diakses pada 15 Agustus 2019

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan Desa sebuah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan laporan dan pertanggung jawaban. Dalam semua itu desa setiap tahun harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa. Dari situ desa akan melihat RPJMDesa, desa sah melihat yang dibutuhkan dalam setahun untuk pembangunan jangka menengah desa. Dari situ desa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa untuk rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Desa membuat anggaran dan belanjaan desa sesuai dengan kebutuhan untuk jangka satu tahun. Dana desa yang bersumber dari APBN yang di peruntukan belanja daerah Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁸⁶

Musrenbang pada Pekon Bangun Negara telah disampaikan oleh Peratin Pekon Bangun Negara menjelaskan yang terlibat dalam musrenbang Pekon Bangun Negara merupakan kewajiban bagi pemerintah Pekon Bangun Negara untuk merencanakan pembangunan dan kebijakan pemerintah Pekon. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh peratin Pekon Bangun Negara terkait peserta atau pihak yang terlibat dalam musrenbang .

Musrenbang pada Pekon Bangu Negara juga melakukan Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara, sebagaimana yang telah di sampaikan Peratin Bangun Negara.hal tersebut pada dasarnya tidak ada ketentuan porsi prioritas penggunaan Dana Desa

⁸⁶Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. 33

dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017, namun penggunaan Dana Desa di prioritaskan pada pembangunan lintas bidang sesuai kebutuhan Desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi Desa. Akan tetapi penetapan porsi penggunaan APBPek yang di sampaikan oleh Peratin Bangun Negara dimana porsi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat merupakan ketentuan yang sejalan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 pasal 11 yang mengacu pada pembangunan kabupaten. Berdasarkan table 3.1 pada BAB III Pendapatan yang di peroleh dari berbagai sumber sebesar Rp. 1.181.457.000,- dan yang digunakan untuk pembangunan sebesar Rp. 647.493.350,- atau sebesar 54,81% dari Pendapatan Pekon Bangun Negara, sedangkan pada bidang penyelenggaraan pemerintah pekon digunakan sebesar Rp. 318.347.250,- atau sebesar 26,94% dari pendapatan Pekon, pada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat digunakan sebesar Rp. 253.061.400,- atau sebesar 21,41% dari pendapatan Pekon Bangun Negara. Jumlah penggunaan dana APBPek mengalami surplus Rp.37.545.000,- yang bersmber dari SILPA 2017.

Penggunaan APBPekon Bangun Negara secara keseluruhan baik bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak, dana Bantuan digunakan secara proporsi yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk Dana Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 telah di atur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 dalam Pasal 11 Mekanisme penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Dan dalam Pasal 12 penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan:

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.⁸⁷

⁸⁷ Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 pasal 1 dan 12

B. Pembahasan

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 .

Segala kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi termasuk Pekon Bangun Negara tentu dibiayai oleh Dana desa merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Sedangkan menurut UU No 09 tahun 2015 desa, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang dilakukan dengan adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Kemudian bila dilihat dari tujuannya, dana desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah, pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah sejalan dengan hal ini pemerintah daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsinya masing-masing terutama terutama fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan Desa yang termasuk Dana Desa tentu memiliki tahapan dan proses, Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur

APBDesa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.⁸⁸

Setelah dilakukan penelitian di Pekon Bangun Negara dengan data yang dihimpun penulis diketahui bahwa besaran total Dana Desa yang diterima oleh Pekon Bangun Negara pada tahun 2018 sebesar Rp.792.084.000,- . Dalam Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian penggunaan Dana Desa di Pekon Bangun Negara tahun 2018 ini digunakan untuk bidang pembangunan fisik di antaranya:

1. Pembangunan drainase (150m x 0,5m x 0,3m) dengan dana sebesar Rp 70.024.700,- dan terealisasi 100%
2. Pembangunan rabat beton (PxLxT = 150m x 3m x 0,15m) dengan dana sebesar Rp. 160.285.600,- dan teralisasi 100%
3. Pembukaan badan jalan + sirtu (PxL= 472m x 5m, timbunan 15cm) dengan dana sebesar Rp 278.077950,- dan terealisasi 100%
4. Gorong-gorong plat beton (1,3m x 1m x 6m, type 50) dengan dana sebesar Rp 17.930.500,- dan terealisasi 100%
5. Pembangunan sumur galian 5m dengan dana sebesar Rp 8.111.700,- dan terealisasi 100%

⁸⁸ Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan

6. Pembangunan TPT (P=745m T=30cm) dengan dana sebesar Rp 52.525.450,- dan terealisasi 100%
7. Pembangunan TPT (P=50m T=1,5m) dengan dana sebesar Rp.30.238.100,- dan terealisasi 100%⁸⁹

Semua pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah pekon dikarenakan masih banyaknya kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang mendesak pada Pekon Bangun Negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kemajuan bagi masyarakat Pekon Bangun Negara. Selain untuk pembangunan Dana Desa digunakan juga untuk di bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya:

1. Sosialisasi pangan yang sehat dan aman dengan dana sebesar Rp 28.988.550,- dan terealisasi 100%
2. Bantuan insentif untuk guru ngaji dengan dana sebesar Rp 24.000.000,- dan terealisasi 100%
3. Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga dengan dana sebesar Rp 12.916.000,- dan terealisasi 100%
4. Penganggaran penyusunan profil pekon dengan dana sebesar Rp 5.732.950,- dan terealisasi 100%
5. Kegiatan pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset pekon berbasis digital dengan dana sebesar Rp 2.320.000,- dan terealisasi 100%

⁸⁹ Laporan Realisasi APBPek Dana Desa Pekon Bangun Negara Tahun 2018

6. Penyelenggaraan musyawarah pekon dengan dana sebesar Rp 11.029.500,- dan terealisasi 100%
7. Kegiatan pelatihan usaha tani dengan dana sebesar Rp 23.020.000,- dan terealisasi 100%
8. Peningkatan kapasitas bum-des dengan dana sebesar Rp 6.883.000,- dan terealisasi 100%

Pengalokasian Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara telah terealisasi 100%. Pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat desa dimana salah satunya secara mayoritas penduduk Pekon Bnagun Negara berprofesi sebagai petani dan pedagang dan lain sebagainya.

Pada tahapan pelaksanaan Dana Desa di Pekon Bangun Negara ini prioritas penggunaannya sudah terfokus pada pembangunan fisik desa sebesar 77,2% dari Dana Desa yang diterima pada tahun 2018. Meskipun demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Peratin Ohpir Patitin mengatakan pembangunan di tahun 2018 ini banyak dilakukan pada satu dusun yakni Dusun Pagar Baru dan Kerbang Tinggi 1.⁹⁰ Sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat di Pekon Bangun Negara penggunaan telah terealisasi sebesar 22,8% dari Dana Desa yang diterima.

Prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara tahun 2018 di bidang pembangunan fisik yakni pembangunan fasilitas dan infrastruktur telah memenuhi standar pembangunan yang tercantum

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Peratin Bangun Negara, Bpk. Ohpir Patirin, 07 Agustus 2019

dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 pasal 5 bagian (a) menyebutkan bahwa pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: (1) lingkungan pemukiman; (2) transportasi; (3) energi; dan (4) informasi dan komunikasi. Sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara yang bertujuan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri telah memenuhi standar pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam pasal 7 bagian (b) pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; (d) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; dan (h) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

Setiap jajaran anggota perangkat Pekon memiliki tanggungjawab sesuai dengan visi dan misi desa tersebut. Pertanggungjawaban itu berupa pelaksanaan pengelolaan dana yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan dapat ditunjukkan hasilnya. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Bangun Negara sudah cukup efektif walaupun adanya kurangnya transparansi informasi laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat Pekon Bangun Negara. Penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah disusun sendiri oleh

pemerintah Pekon yang sesuai ketentuan. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa terkhusus pada prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara tersebut sudah sesuai penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Dana Desa dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat Pekon Bangun Negara, diperkenankan oleh syara' apabila mengikuti kebijakan pemimpin dan tidak melanggar unsur *maqashid syari'ah*. Selain dari itu prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan merupakan suatu kebijakan pemimpin & pemerintah Desa khususnya Pekon Bangun Negara.

Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan, kemakmuran masyarakat atau terpenuhinya unsur *maqashid syariah*. sebagaimana kaidah fiqh yang dirumuskan oleh Imam Syafi' yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : kebijakan pemimpin/khalifah adalah untuk kepentingan rakyatnya.

Umat Islam (rakyat) harus mematuhi segala kebijakan imam demi mewujudkan kemaslahatan tersebut. Untuk kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat maka setiap kebijakan pemerintah harus memenuhi unsur kemaslahatan itu sendiri atau kepentingan umum.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon Bangun Negara tahun 2018 telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018, akan tetapi walaupun proses pembagunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, tahapan pelaksanaan ini harus ada transparansi dari pemerintah Pekon secara umum yakni penyampaian pelaporan penggunaan Dana Desa pada website, papan pengumuman ataupun banner yang ditujukan pada masyarakat Pekon. Selain itu proses ini juga seharusnya melibatkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah di atur dala pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara salahsatunya melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa terkhusus pada prioritas penggunaan Dana Desa Pekon Bangun Negara menunjukan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan Dana Desa, serta dalam

proses musrenbang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah Pekon Bangun Negara yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat Pekon baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa. Meski adanya lembaga pengawasan Pekon Bangun Negara yakni Lembaga Himpun Pemekonan ini tidak memberikan pengawasan secara baik untuk mengingatkan pemerintah Pekon agar melakukan transparansi informasi Dana Desa ke masyarakat pekon. Hal demikian sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 5 menyebutkan Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. Namun transparansi informasi dari pemerintah Pekon Bangun Negara tidak dipublikasikan di ruang publik.

Tahapan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen prioritas penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Pekon Bangun Negara di tahun 2018 telah terimplementasi dan berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 BAB III Pasal 4 ayat 1 dan 2. Namun belum sesuai dengan BAB III Pasal 4 ayat 5.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa dalam pandang hukum Islam digunakan untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum, keberadaan pemerintah Desa adalah untuk

menciptakan dan memelihara kepentingan umum atau kemaslahatan itu sendiri. Jika dilihat dari pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara belum tersentuh secara menyeluruh, dari Dana Desa yang baru dapat dirasakan masyarakat yaitu pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan dan peningkatan pengamalan nilai-nilai sosial, bidang kesehatan. Dengan demikian, terlihat bahwa tujuan dari Dana Desa ini dapat dikatakan tercapai pada peningkatan infrastruktur. Sedangkan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat yakni pada peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat belum tercapai karena aparatur desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat belum memprioritaskan kegiatan ekonomi kreatif, atau menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri dalam meratakan pendapatan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara tahun 2018 yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bila dilihat dari terpenuhinya unsur *maqasid syariah* maka setidaknya ada beberapa yang terpenuhi yakni pada unsur *hifzud din* (proteksi agama) meski dari Dana Desa tidak ada alokasi untuk pembangunan tempat ibadah atau penyediaan fasilitas pendukung untuk kegiatan beragama namun pemerintah Pekon Bangun Negara memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ibadah baik dari setiap dusun untuk mengadakan pembangunan masjid atau non muslim yang minoritas tidak didiskriminasi.

Pada unsur *Hifzun Nafs* (proteksi diri/jiwa) yang berarti memberikan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat, dari Dana Desa Tahun 2018 pemerintah pekon Bangun Negara telah mengadakan sosialisai pangan yang aman dan sehat yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah Pekon Bangun Negara. Selain dari itu Peratin Ohpir Patirin menyampaikan bahwa: “Pada Masyarakat Pekon Bangun Negara yang rata-rata penduduk kelas menengah ke bawah, apabila ada masyarakatnya yang mengalami permasalahan baik pada bidang kesehatan masyarakat seperti warga Pekon Bangun Negara mengalami musibah dan di larikan ke Puskesmas, maka pemerintah baik itu peratin sendiri mandampingi untuk memberikan jaminan keaman dan sosial atau memberikan sedikit bantuan pada masyarakatnya ”

Pada unsur *Hifzul Nasl* (proteksi keturunan) yang berarti pemerintah selalu memikirkan generasi yang akan datang, peneliti belum menemukan terpenuhnya unsur ini oleh pemerintah Pekon Bangun Negara, namun pada Pekon Bangun Negara, telah di sediakan posyandu untuk keselamatan anak-anak di bawah umur dalam kesehatan. Sedangkan unsur *Hifzul Aql* (proteksi akal) yang berarti waspada terhadap industri yang bisa merusak akal dan manusia dan menjadi sumber utama kejahatan, pada Pekon Bangun Negara belum ada perlindungan atau program yang dapat mencegah sumber kejahatan, namun secara umum masyarakat Bangun Negara mempunyai rasa kesadaran dalam

beragama sehingga ini dapat berguna untuk menolak berbagai hal yang merusak akal. Meski tidak ada penggaran Dana Desa pada unsur ini.

Pada unsur *Hifzu Maal* (proteksi harta) yang berarti pemerintah harus menciptakan pemerataan kekuasaan kekayaan agar sumber daya alam Negara tidak dikuasai atau dimonopoli oleh sekelompok saja. Sedangkan pada Pekon Bangun Negara mayoritas potensi Pekon Bangun Negara baik di bidang tanah pertanian, perkebunan sebagian merupakan hak milik pribadi sedangkan pada masyarakat yang sehari-hari sebagai buruh tani tentu sumber pendapatannya adalah bekerja sehari-hari pada penduduk yang memang memiliki pekerjaan untuknya. Kekayaan sumber daya alam yang sebagian milik pribadi masyarakat telah memberikan ketimpangan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Sebab sampai sekarang pemerintah Pekon Bangun Negara belum memberikan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi untuk masyarakat mandiri.

Sebagaimana penjelasan di atas adalah bentuk pencapaian kesejahteraan masyarakat pekon Bangun Negara dari penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dalam pandangan *Maqashid Syariah*. Sedangkan pandangan hukum Islam di bidang Fikih *Siyasah Maliyah* baitulmal yang mengatur pengeluaran Negara telah di atur sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al Hasyr ayat 7 dan Luqman ayat 20:

بَيْنَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِّ الرُّسُولَ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا
 الرُّسُولُءَاتَنُكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَى السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسَكَةِ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخْذُوه

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Q.S. Al-Hasyr (59) : 7)

Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah menetapkan fa'i untuk kelima asnaf (gololngan) ini adalah agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Karena jika Dia tidak menetapkan demikian, maka harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang lemah tidak memperolehnya dan tentu hal itu akan menimbulkan kerusakan yang besar yang hanya diketahui oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala, sebagaimana mengikuti perintah Allah dan syariat-Nya terdapat banyak maslahat. Oleh karena itulah, dasar inilah yang menjadi landasan dalam melakukan pengeluaran Negara pada masa Rasulullah, *khulafaur arrasyidin* dan hingga sekarang. Ayat ini juga memberikan prinsip dasar dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diciptakan Allah Swt. dan dianugerahkan manusia itu tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja. Lagi-lagi, mekanisme ini bisa diwujudkan jika ada institusi negara yang berwenang atasnya.

Kesejahteraan umat menjadi hal penting dan utama dalam menjalankan pemerintahan baik secara rohani maupun jasmani. Dan pada ayat ini juga sebagaimana firman-Nya, *“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”* Telah mencakup *ushul* (dasar-dasar) agama maupun *furu'* (cabang)nya, dan bahwa apa yang dibawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam harus diambil oleh manusia dan tidak boleh menyelisihinya dan bahwa keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap sesuatu sama seperti keputusan Allah Subhaanahu wa Ta'ala, dimana tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya, demikian pula tidak boleh mengedepankan ucapan seorang pun di atas ucapan Beliau.

رَبِّهِ نَعْمَهُ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ الْأَرْضَ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ سَخَّرَ اللَّهُ أَنْ تَرَوْا أَلَمْ
 تُنِيرَ كِتَابَ وَلَا هُدًى وَلَا عِلْمٍ بغيرِ اللَّهِ فِي تُجَادِلُ مِنَ النَّاسِ وَمِنْ وَبَاطِنَةً ظَهَرَ



Artinya: *“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”* (Q.S. Luqman (31) : 20)

Ayat ini mengingatkan pada manusia akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala dimana Allah telah menundukkan seluruh isi alam untuk di dimanfaatkan oleh manusia dengan baik. Dengan demikian

pemanfaatan tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan pada manusia agar bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Namun, pemanfaat apa yang diberikan oleh Allah haruslah diberikan secara merata.

Tujuan dari fiqih *siyasah maliyah* adalah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Sedangkan mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara harus dapat memenuhi kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :

1. Untuk orang fakir miskin.
2. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
3. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Pada masa khalifah Umar r.a., pembangunan infrastruktur menjadi perhatian besar. Umar ibnul khatthab memerintahkan Amr ibn Abdil Amr ibn Ash, gubernur mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk hal ini. Dia melakukan penggalian kanal dari fustat (kairo) ke Suez untuk memudahkan transportasi dagang antara semenanjung Arab dan Mesir. Juga pembangunan dua kota bisnis: Kufah (untuk bisnis dengan romawi) dan Basrah (bisnis dengan persia). Hal tersebut dilakukan pembangunan karena pentingnya manfaat untuk melancarkan arus kegiatan ekonomi yang dapat memakmurkan umatnya.

Menurut Nurul Huda Sistem ekonomi yang dibangun Rasulullah berbasis pada empat pendapatan utama untuk pemerataan kekayaan dan pelayanan publik. Empat pendapatan ini merupakan *zakat*, sedekah, *ghanimah*, dan *jizyah*. Zakat dan sedekah langsung diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sementara *ghanimah* dan *jizyah* diberikan kepada pemerintah untuk digunakan berbagai keperluan publik.⁹¹ Sedangkan pada zaman Umar Bin Khattab selain dari infrastruktur yang di perhatikan, Dana Zakat dan *Ushr* dialokasikan untuk penerima yang berhak dan pada umat lokal, *khums* dan shodaqoh untuk fakir miskin dan kesejahteraan. Selain dari itu *kharaj*, *fa'y*, *jizyah*, *ushr*, sewa tetap di alokasikan pekerja, pemelihara anak terlantar dan dana sosial.

⁹¹ Nurul Huda et al. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta : Kencana, 2105), h. 54.

Didalam pengelolaan Dana Desa yang semula bersumber dari APBN yang di alokasi ke Dana Desa pada Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang pada tahun 2018 terselenggara pembangunan dan pemberdayaan, pengembangan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa terealisasi yang sangat baik dalam bidang pembangunan berupa pembangunan fisik. Namun dalam bidang pemberdayaan dan perkembangan masyarakat kurang baik untuk mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam pandangan hukum Islam implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara dalam bidang pembangunan tentu dibolehkan selama mengikuti Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dimana pembangunan yang dilakukan pemerintah Pekon Bangun Negara bertujuan untuk mengatasi musibah seperti banjir dan genangan air pada dataran rendah serta memudahkan dan meningkatkan aktifitas kegiatan perekonomian masyarakat Bangun Negara, hal ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan jika ditinjau dari pandangan hukum Islam telah terimplementasi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017, namun ini menjadi perhatian dimana prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat pada Pekon Bangun Negara belum maksimal

penggunaannya sebagaimana hasil penelitian jumlah Dana Desa hanya 22,8% yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat atau sebesar 21,41% Dana APBDes yang digunakan. Hal tersebut dinilai masih sedikit dari Dana Desa yang ada atau kurang memenuhi ketentuan yang diberlakukan di kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Peratin Bangun Negara sebelumnya dimana minimal 30% dana APBDes digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. salah satu tujuan *fiqih Siyasah* adalah memakmurkan masyarakatnya sebagaimana pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan lebih dominan penerimaan Negara di salurkan untuk kesejahteraan umat.

Pekon Bangun Negara seharusnya menggunakan dana pemberdayaan masyarakat lebih banyak atau di sesuaikan pada peraturan yang berlaku dan melaksanakan program yang dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan terkhusus pada masyarakat yang tergolong miskin. Sebagaimana pada masa Rasulullah dana Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika Islam sudah berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat baik dari sisi ekonomi, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat. Meskipun demikian Dana Desa yang di berikan kepada Pekon Bangun Negara setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara pada tahun 2018 diimplementasikan pada bidang pembangunan fisik. Pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa sebesar 77,2% dari Dana Desa yang diterima. Prioritas berikutnya adalah prioritas dalam pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa pada pemberdayaan masyarakat digunakan sebesar 22,8% dari Dana Desa yang diterima.
2. Implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara di tinjau dari hukum positif telah terimplementasi dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Dalam Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 1. Namun transparansi informasi prioritas penggunaan dana desa pada Pekon Bangun Negara tidak di publikasikan oleh pemerintah Pekon Bangun Negara di ruang publik sebagaimana Dalam Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 5. Implementasi Prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara tahun 2018 ditinjau dari hukum Islam pada bidang pembangunan di Pekon Bangun Negara dibolehkan oleh *syara'* selama mengikuti peraturan pemerintah dan

pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk kemajuan perekonomian bagi masyarakat Pekon Bangun Negara sebagaimana pada masa Umar Bin Khattab. Bidang pemberdayaan di Pekon Bangun Negara telah sesuai dengan hukum Islam namun jumlah penggunaan Dana Desa masih sedikit atau sebesar 22,8% dari Dana Desa atau sebesar 21,41% dari dana APBPek yang digunakan. Hal tersebut dinilai kurang memenuhi ketentuan yang berlaku di kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Peratin Bangun Negara sebelumnya dimana minimal 30% dana APBPek digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

B. Rekomendasi

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Pekon Bangun Negara untuk kedepannya dapat mempertimbangkan kembali penggunaan Dana Desa dengan porsi yang adil baik pada sisi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut secara perlahan akan memberikan kekuatan ekonomi Pekon dan mengentaskan kesenjangan. Selain dari itu Pemerintah Pekon Bangun Negara dapat memberikan transparansi laporan penggunaan Dana Desa tiap tahunnya ke publik atau masyarakat dalam bentuk laporan di pengumuman public, website, atau baliho sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Desa.

2. Bagi masyarakat agar lebih aktif dan belajar dalam kegiatan pembangunan Desa baik dari segi pengawasan penetapan penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara, pelaksanaa, pengawasan danpertanggung jawaban. Hal tersebu dapat membantu kerjasama antara pemerintah Pekon bangun Negara dengan masyarakat dalam membangun Desa yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buku 2 Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Bee Media Pustaka, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Astawa, I. Gede Pantja *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung : Fokusmedia, 2014.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2016.
- HAW. Widjaja, *Otonomi DESA*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Huda, Nurul et al., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : Kencana, 2014.
- _____, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Kencana, 2015.
- _____, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Imam AlMawardi, *Al-Ahkam As-Sulthanniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bachri, Jakarta : Daar El-Kitab El Araby, 2013.
- Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, Solly, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah* (Bandung : Alumni IKAPI, 1983
- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, Tangerang : Gaya Media Pratama, 2009.

_____, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011.

_____, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: Uin Sunan Ampel press, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2009

_____, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Syarifudin, Amir, *ushul fiqh*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.

Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta : Gitamedia Press, 2017.

UU No. 06 Tahun 2014

PERMENDES No 19 Tahun 2017

Jurnal

Agus Mariin, “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal akuntansi dan Pajak*, 02 januari, 2014.

Ahmad Mustanir, Darmiah, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016*.

Inten Meutia Liliana, “PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 8 Nomor 2 tahun 2017*.

Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Masiyah Kholmi, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”, *Ekonomika-Bisnis* Vol. 07 No. 02 Bulan Juli Tahun 2016.

Mirza Iskandar Putra, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali), (*Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017)

Siti Khoiriah, Utia Meylina, “ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 8 Nomor 2 tahun 2017.

Wawancara

Ohpir Patirin, wawancara dengan peneliti, teks wawancara, Pekon Bangun Negara, 05 Agustus 2019.

Ermansyah, wawancara dengan peneliti, teks wawancara, Pekon Bangun Negara, 06 Agustus 2019.

Ahmad Hirzan, wawancara dengan peneliti, teks wawancara, Pekon Bangun Negara, 07 Agustus 2019.

On-Line

bangunnegara.wordpress.com,

<http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/>,

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyialuran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>,

<https://kbbi.web.id> ,

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Pertemuan dan Wawancara dengan Peratin Pekon Bangun Negara

Bpk. Ohpir Patirin



Wawancara dengan Sekdes dan Bendahara : Bpk. Ermansyah dan Bpk. Ahmad Hirzan